

## OPTIMALISASI PERAN KEPALA DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

*Jafar Noh Idrus*  
*Novie R. Pioh*  
*Donald K. Monintjai*

### Abstrak

Dalam mengoptimalkan peran kepala daerah diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara optimal. Lemahnya kinerja pemerintah daerah, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti langsung menemui Kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metodologi yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Pemerintah Daerah harus lebih mengutamakan pelayanan publik atau dengan kata lain melayani bukan dilayani. Walikota Tidore Kepulauan merupakan seorang pemimpin yang efektif, di mana ia selalu mempunyai rencana, berorientasi penuh pada hasil dan mengkomunikasikan visi tersebut dan mempengaruhi bawahan sehingga arah baru mendapat dukungan dan bersemangat memanfaatkan sumber daya dan energi yang dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut. Pemimpin yang berhasil selalu mengatakan bahwa visi adalah cahaya yang membimbing dan kekuatan yang mendorong bagi organisasi. Para ahli mengatakan bahwa visi adalah faktor vital bagi pemimpin.

**Kata Kunci :** Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk pelaksanaannya di setiap negara. Kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara optimal. Disamping itu, pembangunan sektoral yang terpusat kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya kinerja pemerintah daerah, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan mengatasi dampak krisis ekonomi di daerah, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan alokasi dana ke daerah, mempermudah akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan memperluas kesempatan dalam kegiatan produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Pembangunan suatu bangsa sejatinya ditujukan pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam program-program pembangunan. Karenanya, pengenalan terhadap berbagai aspek berkenaan dengan keberadaan sebuah masyarakat di mana pembangun hendak dijalankan, menjadi sebuah keharusan. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan yang dijalankan dapat lebih dekat dengan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hal tersebut karena keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan

Dalam konteks inilah, proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan penting diperhatikan. Karakteristik masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, tetapi juga dapat menyeberang pada Tindakan responsif atas fakta-fakta sosial tersebut sangat penting bagi para pelaku pembangunan. Gerakan ini tidak hanya mengemuka dalam wacana nasional, tetapi juga harus menjangkau pada level-level dibawahnya seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan

menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

Otonomi daerah adalah alat untuk mencapai suatu keberhasilannya yang ditentukan oleh peran pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Birokrasi) dan rakyat dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah secara umum diyakini mampu memberikan beberapa manfaat yang positif untuk terwujudnya tujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah dan masyarakat setempat lah yang paling mengetahui dan memahami kondisi sosial, ekonomi daerah, dengan perkataan lain, otonomi daerah diyakini dapat menjamin terciptanya efektivitas pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal daripada program-program masyarakat yang dirancang secara sentralistik

Perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mewujudkan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan

adanya otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab adalah masalah birokrasi. Birokrasi yang ada sekarang ini harus di sesuaikan untuk dapat melaksanakan sistem otonomi daerah yang baru.

Dalam kaitan dengan perubahan sistem birokrasi ini, maka ada isu sentral yang menjadi dasar dari perubahan itu, yaitu terciptanya Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diharapkan dapat terbangun salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

.Sehingga masalah yang ada dalam aspek kelembagaan terjadi penyempitan struktur kelembagaan. yang belum melembaganya karakteristik *good governance* didalam pemerintah daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah (*good governance*) di pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan masih bersifat sloganistik.

Lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana diketahui pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu pendanaan, personil, peralatan dan pengelolaan. Bila keempat faktor itu dikembangkan di daerah, maka biasanya akan menimbulkan kendala pendanaan. Sehingga keberlanjutan pembangunan kota Tidore Kepulauan memerlukan institusi lokal yang mampu dan berdaya dalam menghadapi tantangan dan

perubahannya. Saat ini memang ada upaya-upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk membentuk institusi baru, tetapi tidak memperhatikan keberadaan-keberadaan intitusi yang mungkin jika di tingkatkan dan diberdayakan, dapat menjalankan peran baru. Institusi-institusi itu harus mampu mewadahi perubahan disegala aspek, sosial, politik, ekonomi, dan budaya di wilayah kota Tidore kepulauan.

Kelembagaan di kota Tidore Kepulauan akan mengakibatkan gangguan terselubung atau dipensiunkan permasalahan profesionalisme tidak jalan, sehingga berpengaruh kepada kelembagaan. Dinamika perkembangan masyarakat Kota Tidore sangat cepat dengan permasalahan yang semakin multidimensional, menuntut pemerintah daerah kota Tidore kepulauan menangani permasalahan daerah secara tepat dan professional. Di samping itu, masih sering terjadi penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya.

## Tinjauan Pustaka

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian Optimalisasi menurut wikipedia adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk

mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan menggunakan formulasi. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya seperti meminimalisir biaya, meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya. Dalam kaitan tersebut dengan apa yang dijelaskan diatas penulis mencoba menggabungkan konsep “Nellis Rodinelli dan Cheema” yang mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga lembaga menjadi optimal menurutnya antara lain :

1. Adanya dukungan Anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan;
2. Tersedianya Infrastruktur;
3. Tersedianya Sumber daya Manusia yang berkopeten.

Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan kepala daerah berkaitan sekali dengan pemahaman terhadap pengertian daerah. Kata daerah dalam literatur-literatur tata negara dan pemerintahan biasanya mempunyai pengertian tersendiri yang sering dipahami dengan melawankannya pada pengertian “Negara Bagian”. Istilah daerah digunakan untuk menunjuk pada wilayah yang terdapat pada negara kesatuan, sedangkan negara bagian merupakan pada Negara Federasi. Sehubungan dengan hal tersebut, uraian tentang kedudukan kepala daerah perlu di dahului dengan uraian tentang negara kesatuan dan proses pembentukan daerah pada negara kesatuan tersebut (lazim disebut desentralisasi).

Dalam perkembangan sejarah perundangan-undangan pemerintah daerah di Indonesia kadang kala kepala daerah “wilayah administratif” ini juga dirangkap oleh kepala daerah. Dengan demikian, kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi. Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah.

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan, dalam wujud

konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, kepala daerah provinsi di sebut gubernur, kepala daerah kabupaten di sebut bupati, kepala daerah kota di sebut wali kota Untuk daerah provinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam lingkup sempit tugas pokok gubernur sebagai representasi lembaga pelaksana kebijakan yang di buat bersama DPRD provinsi. Namun dalam prakteknya ruang lingkup tugas gubernur lebih luas lagi yaitu melaksanakan peraturan perundangan-undangan baik yang dibuat bersama DPRD provinsi, DPR dan Presiden, maupun lembaga eksekutif pusat sebagai operasionalisasi Undang-Undang.

Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Pemerintah kabupaten bukan bawahan provinsi tapi sesama daerah otonom. Bedanya wilayahnya lebih kecil dari provinsi, wilayahnya dibawah kordinasi suatu provinsi, sistem pemerintahanya hanya berasaskan desentralisasi. Hubungannya adalah hubungan kordinatif, maksudnya pemerintahan kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah kordinasi pemerintahan provinsi yang bersangkutan.

Berkaitan dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya (dalam Siswanto, 2006 : 55) juga mengatakan bahwa Berdasarkan suatu teoritis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan senirgis, antar pemegang kekuasaan, yakni Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan dapat menjadi basis kearah terciptanya sistem sebagai persyarat kearah perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih demokratis.

Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Dalam upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk membangun sebuah hubungan yang saling memengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menggeneralisir, pada prinsipnya kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang memengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin.

## Metode Penelitian

Yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian diskritif kualitatif, yaitu mengamati semua laporan tentang berbagai kejadian dan interaksi yang di amati langsung oleh penulis, artinya penulis terlibat secara partisipatif dalam observasi (participant obserfation). Yang bertujuan membuat diskripsi hasil penelitian yang dikaitan dengan peraturan perundang –undangan.

Penelitian ini difokuskan pada Kepemimpinan Kepala Daerah dalam

mengoptimalisasi Pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan

Walikota dan Wakil walikota Kota Tidore Kepulauan, Bagian organisasi Pemerintah kota Tidore Kepulauan, Bagian Lembaga Hubungan Masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan walikota kota tidore kepulauan, sekretaris kota tidore kepulauan. Data yang dikumpulkan antara lain:

- 1) Sesuai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan di kota tidore kepulauan.
- 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan kota tidore kepulauan.

## Hasil Penelitian

Pemimpin merupakan pihak terpenting yang berada pada garis terdepan dalam mewujudkan perubahan karena dituntut dan diberi tanggung jawab untuk mampu menjalankan roda organisasi secara efektif. Keberhasilan para pemimpin menanggapi perubahan yang terjadi memerlukan pola kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut. Faktor budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya organisasi. Untuk itu, peranan pemimpin dalam upaya membentuk dan membangun budaya organisasi yang kondusif bagi pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh budaya organisasi yang ada dalam organisasi tersebut.

Telah kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah telah mengisyaratkan bahwa peran pemerintah daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Undang-Undang tersebut juga telah memperkuat posisi pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek dari pembangunan, artinya pemerintah daerah lebih menempatkan masyarakat sebagai aktor partisipasi pembangunan itu sendiri

Pemerintah Daerah harus lebih mengutamakan pelayanan publik atau dengan kata lain melayani bukan dilayani. Dalam konsep otonomi daerah membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan masyarakat dengan memperkuat melalui partisipasi masyarakat yang ada di daerah itu sendiri, penguatan tersebut baik dalam rekrutmen politik lokal maupun dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Kewenangan daerah dilaksanakan dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Daerah memiliki keleluasaan otonomi yang cukup besar dalam membangun daerah, kewenangan yang utuh dan bulat tersebut dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Untuk menentukan gaya kepemimpinan Walikota yang paling efektif dalam menghadapi keadaan tertentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemimpin efektif harus menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam situasi berbeda, tidak tergantung pada satu pendekatan untuk semua situasi. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin/Walikota dilakukan dengan mengamati sifat-sifat dan kualitas/mutu perilakunya.

Salah satu strategi dalam mewujudkan visi dan misi Kota Tidore Kepulauan Walikota memiliki keyakinan

yang teguh akan kebenaran dan semua perilaku yang dikerjakan, dengan memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi semua bawahan. Komitmen akan mewujudkan visi dan misi inilah yang menunjukkan bahwa sosok Walikota mengarah pada gaya yang kharismatik. Melalui berbagai cara dalam mereformasi birokrasi dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas seperti merubah cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak), mendahulukan peranan dari wewenang agar terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan professional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemimpin yang berhasil selalu mengatakan bahwa visi adalah cahaya yang membimbing dan kekuatan yang mendorong bagi organisasi. Para ahli mengatakan bahwa visi adalah faktor vital bagi pemimpin. Walikota Tidore Kepulauan merupakan seorang pemimpin yang efektif, di mana ia selalu mempunyai rencana, berorientasi penuh pada hasil dan mengkomunikasikan visi tersebut dan mempengaruhi bawahan sehingga arah baru mendapat dukungan dan bersemangat memanfaatkan sumber daya dan energi yang dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut.

Pemimpin dalam era pembaharuan adalah seorang yang mampu menciptakan suatu lingkungan inovatif, tidak menghambat kreativitas murni dan potensi kekuatan kerja setiap bawahan. Pemimpin pembaharuan memberi arah dan pandangan keluar demi kebutuhan bawahan. Pemimpin membantu untuk menciptakan lingkungan kebanggaan, loyalitas, bukan ketakutan dan intimidasi. Di sinilah pemimpin mampu meletakkan tujuan sebagai komitmen organisasional

yaitu loyalitas bawahan melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian organisasi, serta keinginan agar bertahan di dalam organisasi

Pemimpin yang sangat diharapkan oleh bawahannya adalah pemimpin yang memiliki integritas (keutuhan, kejujuran, dan ketulusan hati) dengan baik. Integritas ini yang menjadi modal bagi pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa Walikota Tidore Kepulauan sangat bersifat terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan bawahannya bahkan merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama. Namun, ada kelemahan yang dimiliki Walikota yaitu perasaan yang lebih mendominasi ketimbang rasionalitas yang dikedepankan, disisi lain Warna partai politik menjadi satu instrumen dalam mempengaruhi bawahannya.

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan :

- 1) Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- 2) Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
- 3) Perubahan manajemen keuangan dengan member peran lebih pada kas umum daerah;
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah,

termasuk pendapatan dari pihak ketiga;

- 5) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Tidore Kepulauan lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu, sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sector primer dan mata rantainya.

Terdapat tiga elemen penting dalam menentukan belanja daerah, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah, dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- 2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ketersediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- 3) Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil

adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Berdasarkan hasil di atas, peneliti melihat bahwa Permasalahan pembangunan memiliki kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat di simpulkan di bawah ini mengenai optimalisasi peran Kepala Daerah di Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yaitu pola kepemimpinan. dalam kesimpulan ini,peneliti mengambil kesimpulan yang menjadi masalah yang substansial adalah terkait dengan lemahnya sumber daya aparatur dan fungsi kontrol aparatur pemerintahan terkait dengan kebijakan-kebijakan daerah yang masih lemah.

Pemerintah adalah stek holder sekaligus pengambilan kebijakan dalam organisasi harus mengedepankan kepentingan-kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individual. Jajaran aparatur pemerintah khususnya di Kota Tidore Kepulauan saat ini belum berjalan maksimal sehingga masih

terjadi tumpang tindih di tingkat Organisasi.

budaya kerja utamanya disiplin pegawai.

Selain itu, adanya kelonggaran di tingkatan aparatur pemerintahan terkait dengan fungsi kontrol pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena kedua hal ini menjadi bagian terpenting sehingga tujuan dan cita-cita dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan efisien.

## Saran

1. Pola kepemimpinan Team Leader harus dapat di kedepankan sesuai dengan peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016. Mengenai organisasi perangkat daerah oleh karena karakteristik masyarakat yang semakin berkembang saat ini dimana kebutuhan untuk mengembangkan diri dan menyampaikan pendapat secara bebas setiap individu sedang di bangun.
2. Pemimpin dapat menyeimbangkan antara pola kepemimpinannya dengan tuntutan lingkungan organisasi yang dinamis
3. Harus ada sanksi moral yang diberikan oleh walikota Tidore Kepulauan kepada bawahannya.
4. Harus ada internasasi budaya sehingga budaya kerja birokrasi di Kantor Walikota Tidore Kepulauan bisa maksimal.
5. Harus ada ketegasan dari atasan, sehingga komitmen pegawai untuk meningkatkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Thoha. 2007. *Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arturo. 2008. *Pengembangan Kelembagaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Perencanaan Ekonomi Dan Sosial.
- Bernard. 2008. *Pengantar organisasi* Jakarta.
- Borneo, Locke, 2010. *Esensi Kepemimpinan*. Jakarta Mitra Utama.
- Cheema G. Shabbir, Dennis A, Rondinelli (Ed). 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Contries*, London; Sage Publication, Inc
- Crider. 2008. *Manajemen Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Bandung
- Fritz Heider 2008. *Pengantar Sosiologi* Jakarta. CV. Rajawali
- Fleishman, Trinaningsi, 2010. *Pemimpin Dan Kepemimplnan*. Jakarata :Raja Gramedia.
- Harsono. 2008. *Pemimpin Kelembagaan*. Jakarata :Raja Grafindo
- Huges. 2011. *Pat Goal*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Kreitmer Dan Knicki, 2012. *Kecerdasan Emosional Dalam Kepemimnpan Organisasi*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Kadarusman, D. 2012. *Natural Intelligence Leadership: Cara Pandang Baru Terhadap Kecerdasan dan Karakter Kepemimpinan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 3 No. 3 Tahun 2019  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Mangkunegara 2008. *Manajemen Reformasi Birokrasi* Pustaka Jogjakarta

Mullins, L. J. 2005. *Management and Organisational Behaviour*. England: Pearson Education Limited.

Sutarto. 2008. *Dasar-Dasar Organisasi*. Jakarta: Gadjadara University Press.

Tampubolon, 2009. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Thomson victor A, 2008. *Modern organization*. New York : Alfred A Knoff.

Trisningsih, S.2009. *Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Sebagai pengaruh Pemahaman Good Governence, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

### **Sumber – Sumber Lain :**

Undang- Undang Nomor, 23 Tahun. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Organisasi Daerah  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan